

**PEREMPUAN KEPALA DESA:
Kajian Dediferensiasi dan Derasionalisasi Peran Perempuan Kepala Desa
dalam Pembangunan Pedesaan**

***FEMALE VILLAGE HEAD:
Study of Dedifferentiation and Derationalization of the Role
of Women Village Heads in Rural Development***

Oleh:

Ashari Ismail¹, Firman Umar², dan Bakhtiar³

^{1, 2, 3} Universitas Negeri Makassar

¹ashariismail272@gmail.com; ²firmanumar1208@yahoo.com; ³bakhtiar@unm.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini adalah kajian tentang peran perempuan Kepala Desa Manuba, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, dalam masyarakat berkultur patriarchy. Peran perempuan kepala desa ini adalah indikasi dari peran yang sering dianggap “tidak nisacaya” dilakukan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah mengurai tentang dediferensiasi dan derasionalisasi peran Kepala Desa dalam pembangunan pedesaan, sebagai peran yang memiliki akses dan control---dan sekaligus memberikan “pembuktian” urgensi kiprah perempuan dalam ranah politik pedesaan. Riset yang menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi ini, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen urgen dalam riset ini adalah “peneliti sendiri”, yang mengikuti asumsi sosial kultural. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif, yakni analisis yang bertolak pada kesahihan data, mengeneralisasi data valid, memberikan tafsiran dan menetapkan generalisasi secara induksi, dengan dipandu secara “deduksi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dediferensiasi dan derasionalisasi peran serta perempuan dalam ranah politik, sebagai Kepala Desa di Desa Manuba, bukan semata *ideology of women*, tetapi peran yang dituntut oleh masyarakat. Kiprah perempuan Kepala Desa Manuba, adalah peran yang tidak lepas dari peran-peran publik--- walaupun peran-peran domestik, tidak dapat dilepaskan dan diambil alih oleh laki-laki. Dediferensiasi (ketidadaan perbedaan gender antara laki – perempuan, dengan kemajuan yang regresif) dan derasionalisasi, menafikan kebiasaan, yang rasional, yang cenderung terjustifikasi dalam masyarakat patriarchy. Dalam hal ini kiprah perempuan Kepala Desa adalah kiprah, yang tidak kurang dari lelaki, kiprah yang dituntut dan diharapkan pada komunitas masyarakat patriarchy Manuba, --- yang tidak menimbulkan kegoncangan budaya atau anomie ketidakselarasan.

KATA KUNCI: *Perempuan, Kepala Desa, Dediferensiasi dan Derasionalisasi*

ABSTRACT: This study is a study of the role of women in Manuba Village, Barru Regency, South Sulawesi, in patriarchal cultured communities. The role of women village heads is indicative of a role that is often considered "unnecessary" by women. The purpose of this study is to elaborate on the dedifferentiation and derationalization of the role of Village Heads in rural development, as a role that has access and control---and at the same time provides "proof" of the urgency of women's work in the realm of rural

politics. Research that uses qualitative methods of this phenomenological approach, with data collection techniques of interviews, observation and documentation. An important instrument in this research is the "researcher himself", who follows socio-cultural assumptions. The data analysis technique used is comparative analysis, which is an analysis that departs from the validity of the data, generalizes valid data, provides interpretations and determines generalizations by induction, guided by "deduction". The results showed that the dedifferentiation and derationalization of women's participation in the political sphere, as Village Heads in Manuba Village, is not merely an ideology of women, but a role demanded by the community. The work of the female Head of Manuba Village, is a role that cannot be separated from public roles--- although domestic roles cannot be released and taken over by men. Dedifferentiation (lack of gender differences between men and women, with regressive progress) and derationalization, denying habit, the rational, which tends to be justified in patriarchal societies. The work of the female Head of Manuba Village, is a role that cannot be separated from public roles--- although domestic roles, cannot be released and taken over by men. Dedifferentiation (lack of gender differences between men and women, with regressive progress) and derationalization, denying habit, the rational, which tends to be justified in patriarchal societies. In this case, the work of the village head woman is a gait, which is no less than a man, a gait that is demanded and expected in the patriarchal community of Manuba, -- that does not cause cultural shock or anomy of misalignment.

KEYWORDS: Women, Village Head, Dedifferentiation and Derationalization

PENDAHULUAN

Sejumlah kajian sosio budaya menjustifikasi bahwa laki- laki perempuan, memiliki peran yang *strategic – equal* dalam dalam berbagai ranah pembangunan (Mustadjar, 2017 : 1). Laki - perempuan, secara nature – culture adalah fungsional, saling menunjang --- melengkapi—bukan hal yang harus dipertentangkan. Kaitan laki-laki perempuan adalah relasi gender menjadi suatu yang dilegalkan secara komunal. Ideologi demikian, menjadi diktum bahwa relasi gender tidak saja berpengaruh langsung dalam kegiatan ekonomi masyarakat, namun juga berpengaruh terhadap penerimaan perempuan dalam kiprah-kiprah kekuasaan perempuan. Konsepsi pembangunan suatu masyarakat – diadigumkan dalam proyek *GAD* bahwa laki-laki – perempuan, adalah relasi yang setara – dan tidak saling memarginalkan.

Hubungan pria – perempuan yang setara merupakan prasyarat yang fungsional yang perlu terus didorong secara berkesinambungan. Dalam kaitan ini Ken Suratiyah, mempermaklumkan – partisipasi perempuan dalam masyarakat tidaklah semata *ideology of women primary work*, namun merupakan suatu “keharusan” demi memenuhi kebutuhan (Amiruddin dan Ismail, 2013), termasuk kebutuhan politik masyarakat.

Dalam studi-studi sebelumnya, kecenderungannya, fokus kajian pada persoalan peran perempuan kebanyakan dalam ranah publik, ataupun kiprah yang tidak terbantahkan dalam ranah domestik (Sajogyo, 1992; Butar-Butar, 1995; Hendson, 2001; Ismail, 2001; Ismail; 2007; Mustadjar, 2017; Tindangen, 2020; Tuwu, 2018; Rahayu 2020, Zahrok, 2018 ;). Kajian fokus pada persoalan ekonomi, pengambilan keputusan, atau partisipasi para perempuan dalam ranah publik

(pertanian, buruh pabrik, peternak, dan berbagai ranah publik lainnya), tetapi kajian yang mengkhhusus pada ranah politik, akan kiprah perempuan di pedesaan nyaris kurang tersentuh, padahal “posisi tawar perempuan” – tidak lepas dari “posisi perempuan dalam bidang politik . Dalam kaitan ini, kajian tentang perempuan dalam ranah ;politik adalah hal yang cenderung terjustifikasi secara “derasionalisasi atau dediferensiasi” dalam pembangunan.

Terkait dengan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan desa, dalam pandangan teori konstruksi social adalah bagian dari bentuk budaya. Keterlibatan perempuan dalam politik, adalah keadilan gender yang menafikan marjinalisasi, subordinasi, stereotype dan diskriminasi. Bentuk social keadilan gender adalah wacana public politik desa dan merupakan dialektika. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan (*empowerman*) -- gender (laki-perempuan) yang diperhadapkan dengan *dediferensiasi* dan *derasionalisasi*, dalam mendinamisasi atau merekonstruksi hasil-hasil pembangunan, --- secara general dipahami sebagai konstruksi social dari suatu proses dan dinamika kehidupan, yang berorientasi pada pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan, dalam berbagai aspek termasuk ranah politik.

Dalam pandangan Tiryakian (1992), *dediferensiasi* adalah aspek logis dari suatu tahapan kehidupan atau suatu proses regresif yang memiliki dampak sebagai konsekuensi bentukan - --(didalamnya terjadi suatu pembiasaan), sedang *derasionalisasi* adalah “penafikan kognitif” pandangan dunia, yang terkerdikan oleh “pengembosan kerasionalan” atau demitologisasi pengetahuan tentang apa yang seharusnya terjadi. Lebih jauh Tiryakian (1992) menyatakan bahwa

dediferensiasi dan derasionalisasi adalah dalam pandangan modernitas dasar untuk dialektika perubahan atau “counterprocesses” atau “anti-tropik proses”. Dalam hal ini, dipahami bahwa dediferensiasi atau derasionalisasi adalah sesuatu yang tak terhindarkan --- dan merupakan elemen urgen dalam dinamika perubahan. Dengan demikian dediferensiasi dan derasionalisasi adalah aspek dialektika modernitas Barat, yang mungkin pada kultur local (wilayah Timur) dapat saja ditemukan sebagai konstuksi masyarakat.

Dalam hal lain, cukup dipahami secara sosiologis, sumbangan perempuan dalam ranah politik, tidak dapat dipandang *second class*. Konstitusi Indonesia, tidak menjustifikasi bias gender dalam memilih pemimpin. Pemimpin – tidak hanya diharapkan berasal dari laki-laki, tetapi juga perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki perempuan. Permakluman demikian, secara hukum, telah dijustifikasi, namun secara kultur, dalam *budaya patriarch masih membutuhkan pertanyaan dan solusi*, kiprah perempuan yang diterima secara budaya. Dalam kaitan ini, riset, berupaya untuk mengkaji makna *dediferensiasi dan derasionalisasi kultural* penerimaan perempuan sebagai pemimpin (Kepala Desa), dalam masyarakat patriarch Manuba ? Bagaimana, urgensi hal ini, analisis berikut akan mengkajinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang *Dediferensiasi dan Derasionalisasi* peran perempuan Kepala Desa dalam pembangunan politik desa, adalah riset yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sasaran kajian riset ini adalah kajian gender, menelaah peran Perempuan Kepala Desa dalam

Pembangunan Politik, yang diorientasikan pada makna dediferensiasi (ketidadaan perbedaan gender antara laki – perempuan) dalam peran politik—yang cenderung menggugat budaya patriarchy, dan derasionalisasi (penghindaran batas - batas peran domestic dan public) sebagai peran elementer yang dilakoni perempuan kepala desa dalam masyarakat patriarchy pedesaan. Subyek riset/ sasaran riset adalah Kepala Desa Manuba. Dipahami dalam menerapkan pendekatan fenomenologi, maka sasaran riset adalah juga sampel riset terpilih secara purposive, yakni : perempuan Kepala Desa. Terpilihnya, sasaran riset demikian sebagai obyek penelitian dimungkinkan karena Kepala Desa yang dimaksud adalah perempuan, dan dianggap memiliki peran yang dediferensiasi dan derasionalisasi dalam perannya sebagai pemimpin desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diantara daerah yang tidak lepas dari penguasaan Belanda pada masa penjajahan adalah Manuba, daerah yang berdekatan, dengan Nepo, yang saat ini berada dalam lingkup administrative Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Wilayah Manuba, adalah wilayah pegunungan, dengan jarak tempuh dari Palanro sekitar 30 Menit, atau sekitar 25 km. sekitar ±20 km. Desa Manuba ini adalah desa tani yang pencaharian rakyatnya sebagai petani sawah padi. Dalam hal lain juga daerah Manuba merupakan pedesaan yang memberikan penghasilan dalam hal peternakan, nampak dipinggir jalan desa ---- ternak sapi yang demikian banyak, sebagai andalan peningkatan kesejahteraan rakyat Manuba.

Jika kita jalan sepanjang jalan menuju Desa Manuba, dari Palanro Mallusetasi, hingga sampai ke Desa Manuba, melalui hamparan persawahan,

maka nampak disepanjang jalan ...kita lihat demikian banyaknya peliharaan Sapi. Nampak kemerah-merahan, pada setiap lahan persawahan (Hasil, Observasi)

Dalam pandangan komunitas Manuba perbedaan gender laki-laki – perempuan, bukanlah hal yang perlu dipertajam, walaupun komunitas ini, masih dalam “kultur patriarchy”. Pemahaman komunitas Manuba, yang sudah berfikir sudah maju, laki-laki – perempuan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Laki-laki adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan alat reproduksi kelamin *kelaki-lakian* melekat padanya. Demikian juga perempuan makhluk yang diamanahkan dengan alat reproduksi kewanitaannya. Masyarakat Manuba juga memahami bahwa dalam hal kepemimpinan yang harus diperhatikan terhadap seorang pemimpin adalah bagaimana kemampuan dan perhatiannya terhadap rakyat. Demikian juga pemahaman masyarakat Manuba, bahwa seorang pemimpin : harus dengan budi pekerti yang baik, taat pada adat, pengayom masyarakat, dan ikut dan mau merasakan problem masyarakat. Dalam kaitan demikian, masyarakat Manuba, secara implisit memperlakukan bahwa tidak ada perbedaan laki-laki – perempuan, dalam hal kepemimpinan, semua sama, differensiasinya hanya terletak pada kemampuan dan kompetensi mereka dalam memahami “masalah rakyat” dan mau berbuat demi kepentingan masyarakat Manuba.

Lepas dari pandangan di atas, pemahaman perempuan Kepala Desa Manuba, tentang kepemimpinan adalah bahwa pemimpin adalah amanah harus diemban, dengan penuh tanggung jawab. Mengemban amanah dengan sebaik-baiknya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran/filosofi kehidupan Bugis tentang *wara (kehati-hatian)* dan *gattang* (lurus). Dalam hal lain, Kepala Desa Manuba, menganggap bahwa posisi

mereka sebagai kepala Desa adalah tanggungjawab moral yang mereka harus pikul, demi masalah masyarakat Manuba. Perempuan Kepala Desa ini, menyatakan bahwa kebijakan yang mereka keluarkan dalam memimpin harus berdasar pada kebutuhan dan keinginan masyarakat demi kemajuan. Bagi kepala Desa Manuba, kemajuan masyarakat Manuba adalah bagian dari misi politiknya sejak saat mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan harus dibuktikan dengan tindakan nyata dalam program pembangunan. Kepala Desa Manuba cukup menyadari, bahwa masyarakatnya, adalah masyarakat yang butuh kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka maka menurutnya tidak lah pantas menghinati harapan-harapan masyarakat.

Tidaklah pantas, menghinati rakyat, dan merupakan tanggungjawab moral, dalam melakukan amanah sebagai Kepala Desa. Dulu saya bersaing dengan calon kepala desa dari laki-laki, tetapi nampaknya amanah itu diserahkan pada saya (KepDes, Manubah)

Kepala Desa Manuba, dalam tindakan-tindakan kepemimpinannya sebagai perempuan telah melakukan “kebijakan yang melampaui” dediferensiasi keadilan mereka sebagai perempuan. Kecenderungan peran Kepala Desa Manuba dalam kungkungan kultur patriarchy, kiprah mereka “kurang logis”, atau kurang bisa dipahami – dalam tata masyarakat yang masih kental dengan patriarchy. Dalam hal ini, tentu adalah hal yang biasa, dari kultur yang ada. Dicontohkan : hal yang cukup ironis, setelah sang perempuan ini terpilih sebagai Kepala Desa, sang Kepala Desa perempuan ini dituntut senantiasa menjaga adat istiadat agar tetap lestari, sebagai warisan leluhur tidak boleh pudar, padahal adat ini, kental dengan kultur patriarchy. Informasi yang

didapatkan bahwa kepala desa senantiasa menghadiri setiap upacara adat, upacara kematian, pesta perkawinan dan berbagai warisan budaya tetap mereka jaga demi kemajuan dan martabat masyarakat Desa Manuba.

Saya dalam menjalankan tugas Kepala Desa senantiasa menjaga adat, menghadiri berbagai upacara-upacara yang dilakukan masyarakat Manuba (dipahami sebagai warisan leluhur mereka yang harus dipelihara (KepDes Manuba).

Permakluman akan upaya kepala desa dalam menjaga adat-istiadat, adalah tuntunan masyarakat, dan tidak lepas dari cara pandang kepala desa Manuba dalam memahami kepemimpinan, bahwa memimpin harus berdasarkan pada adat istiadat dan agama. Adat istiadat dipahami sebagai warisan leluhur yang mengakar dalam pola kehidupan sedangkan agama adalah jalan ilahiah yang tidak hanya menuntut keselamatan dunia tetapi juga keselamatan akhirat. Suatu pernyataan yang cukup signifikan dipahami oleh kepala desa Manuba dan warga Manuba pada umumnya. Dalam hal ini, tentu adalah hal yang dediferensiasi dalam penerimaan sang kepala desa sebagai pemimpin.

Dalam hal lain, kecenderungan kehadiran Perempuan Kepala Desa Perempuan ini, dipahami sebagai penafikan kognitif” – hal diluar nalar, jika dipahami secara etik, hal mana perempuan Sang Kepala Desa ini, berperangai dan berpenampilan amat sederhana, sebagaimana perempuan ibu rumah tangga lainnya, namun mereka dituntut untuk mensejahterakan dan memajukan masyarakat Manuba.

Perempuan Kepala Desa Manuba, amat sederhana pembawaannya, nampak seperti Ibu rumah tangga biasa, tidak ada

gelagat formal yang menunjukkan bahwa ia adalah Kepala Desa (Hasil Observasi).

Sosok perempuan Kepala Desa, yang sederhana dalam kungkungan komunitas patriarchy, dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manuba. Perempuan Kepala Desa Manuba ini, memperlakukan dirinya, akan senantiasa berikhtiar memajukan masyarakatnya. Berbagai program-program pembangunan desa yang dijalankan yang bertumpuh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, seperti: upaya peningkatan intensifikasi pertanian, pengadaan posyandu, dan air bersih dan lain-lain. Dalam hal lain juga pemerintah desa senantiasa meningkatkan keamanan masyarakat, berbagai program-program keamanan yang dilakukan demi keamanan desa. Permakluman demikian cukup dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa Manuba. Dalam kaitan ini, Sang Kepala Desa, sebagai perempuan, yang lahir dan besar di Manuba, cukup memahami dan mau melakukan apa saja demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sikap dan tindakan sang Kepala Desa, dianggap “telah melawati” batas-batas keperempuannya, derasionalisasi sebagai perempuan yang sederhana dan bersahaja, dtengah budaya patriarchy yang masih kental.

Memahami peran perempuan Kepala Desa Manuba diatas, jika dikaitkan dengan pemahaman Masuda (2023: 95), bahwa kekuasaan sering ditunjukkan melalui tindakan satu individu, maka peran perempuan Kepala Desa tersebut, dapat dipahami, memiliki pengaruh kuasa dan kuat dalam komunitas patriarchy. Atau dapat juga dipahami peran perempuan Kepala Desa adalah memiliki kekuasaan resmi dan legal untuk menyuruh pihak lain untuk taat (Kristeva, 2020 : 123). Dalam pemahaman Weber (Lubis, 2017: 41)

peran Kepala Desa Manuba tersebut, dipahami memiliki *value oriented* atau *goal oriented*. Dalam hal lain, jika dikaitkan dengan pendekatan Teori Konstruksi Sosial yang menyatakan: manusia merupakan instrument dalam menciptakan realitas sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhi melalui proses internalisasi (M. Poloma, 1994), maka apa yang dilakukan oleh perempuan Kepala Desa di Manuba adalah juga bagian dari konstruksi social, yang selama ini --- ditenggelamkan oleh kultur patriarchy. . Dalam hal lain, , dipahami bahwa kiprah perempuan kepala desa, dalam hal dediferensiasi dan derasionalisasi yang terdapat dalam masyarakat patriarchy adalah bagian dari proses dialektik; objectivitas, internalisasi dan eksternalisasi, suatu permakluman yang cukup dipahami dalam kaitannya dengan fenomena empiric yang ada pada komunitas sasaran riset.

Demikian juga jika riset ini dikaitkan dengan pandangan Triyikian (1992), yang menyatakan bahwa dediferensiasi adalah aspek logis dari suatu tahapan kehidupan atau suatu proses regresif yang memiliki dampak sebagai konsekuensi bentukan, maka peran Perempuan Kepala Desa adalah hal yang dediferensiasi. Bias gender dari peran-peran perempuan Kepala Desa, -- tidak ditemukan, justru kultur patriarchy, pada komunitas Manuba, cenderung penghambat dari peran-peran perempuan Kepala desa. Sedang derasionalisasi yang dipahami sebagai “penafikan kognitif” pandangan dunia, adalah hal yang bisa dipahami sebagai lompatan kognitif, hal mana peran perempuan Kepala Desa, yang dikungkung oleh budaya patriarchy – dapat melakukan peran konstruktif demi kemajuan masyarakat Manuba. Perempuan Kepala Desa dalam

aktivitas di ranah public memiliki peran dan ruang social. Tentu apa yang dilakukan oleh Perempuan Kepala desa tersebut, memiliki *sign value* (nilai tanda), dalam hal status, ekspresi, gaya hidup, kekuasaan, kehormatan (Hidayat, 2021: 91) yang dalam konteks pembangunan, adalah bagian dari pembelajaran —dan inspirasi, dalam melawan kultur yang mengekang aktivitas perempuan di ranah public.

PENUTUP

Kajian tentang *dediferensiasi* dan *derasionalisasi* peran perempuan Kepala Desa dalam pembangunan, adalah kajian yang meletakkan tindakan perempuan Kepala Desa Manuba, dalam peran *leader* sebagai perempuan, yang melakukan “kebijakan yang melampaui” *dediferensiasi* self dia sebagai perempuan. Ditengah kungkungan kultur patriarch, peran perempuan Kepala Desa melakukan peran yang secara etik, amat kurang bisa diterima nalar. Perempuan Kepala Desa mampu berkiprah ditengah ketatnya adat istiadat yang menonjolkan “kultur kebapakan”. Demikian juga *derasionalisasi* terpahami dalam kiprah perempuan Kepala Desa Manuba. Kecenderungan *self* keibuan dan kesederhaan perempuan Kepala Desa Manuba, “tampil sebagai ibu rumah tangga’ tetapi memiliki visi dan peran dalam membangun Manuba, baik segi sosial, pendidikan, keamanan dan agama. Dalam hal ini, kiprah perempuan Kepala Desa, adalah menafikan kognitif masyarakat luar, sebagai suatu lompatan kiprah, yang mungkin “melebihi kiprah laki-laki. Lepas dari kiprah secara *dediferensiasi* dan *derasionalisasi* Perempuan Kepala Desa Manuba, maka periset merekomendasikan: (1). Dalam kaitannya dengan kebijakan, harus menjadi pelajaran “siapa pun, laki-laki – perempuan”, dapat menjadi leader

dalam masyarakat selama mereka memiliki kecakapan, *sofskill* dan basis politik yang kuat; dan (2). Dalam kaitannya dengan riset lanjutan, riset lanjutan dapat dilakukan dalam fokus lain seperti: “demokratisasi pedesaan, gaya kepemimpinan perempuan Kepala Desa”. Riset ini, hanya “fokus pada *dediferensiasi* dan *derasionalisasi*”, tentang kiprah perempuan Kepala Desa Manuba, kefokusan riset pada setting tersebut, tentu “belum menyentuh secara komprehensif tentang Peran Perempuan Kepala Desa Manuba, maka riset setting berbeda amat diharapkan, demi “terkajinya” kiprah-kiprah politik perempuan Kepala Desa Manuba.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Ismail, 2013. Perempuan Pedagang Jalanan, dan Pelacur Warung Remang. Makassar. Lembaga Penelitian UNM
- Butar Butar, Hasudungan, 1995. *Peranan Wanita Batak Toba Dalam Keluarga dan Pertanian Padi Sawah di Desa Lumban Gurning, Kecamatan Porsea Tapanuli Utara*. Bandung PPs Universitas Padjadjaran
- Hendson, Keven and Rogers, Jackie Krasas. 2001. *Why Marcia, You Ve Change ! Male Clerical Temporary Workersd Doing Masculinity in a Femenized Occupation*. Gender and Society, Volume 15 Number 2 April 2001
- Hidayat, Medhy Aginta.2021. Jean Baudrillard dan Realitas Budaya Pascamodern. Yogyakarta. Cantrik Pustaka
- Ismail, Ashari. 2007. *Perempuan dalam Religi Patung: Studi tentang Ajartan Pasanga Mencegah Tindak Kekerasan terhadap*

- Perempuan. Disertai. PPs. Universitas Airlangga Surabaya.
- Ismail, Ashari 2001; *Pola Partisipasi Wnaita dalam Pembangunan Masyarakat Teransmigran: Kasus pada Komunitas Transmigran Baras Sembilan, Mamaju Sulawesi Selatan*. Makassar. Pusat Penelitian UNM
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso. 2022. *Gerakan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta. Pustaka pelajar
- Lubis, Ridwan. 2017. *Sosiologi Agama; Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*. Jakarta. Penerbit Kencana
- Masudah, Siti. 2023. *Sosiologi Keluarga; Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*. Jakarta. Penerbit Kencana
- Mustadjar, Musdaliah dan Ismail, Ashari. 2017. *Pola Kerja Perempuan Tani dalam Pencarian Nafkah Keluargadi Larewa Kabupaten Luwu*. Makassar. Universitas Negeri Makassar
- Poloma, Margaret. M 1994. *Sosiologi Kontemporer Jakarta*: PT Raja Grafindo Perkasa
- Rahayu, Luh Riniti . *Potensi Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama Di Indonesia* *Jurnal .Pustaka* Vol. XX No. 1 (Pebruari 2020)
- Sanderson, Stephen K. 2000. *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sajogyo, Pujiwati. 1992. *Peranan Wanita dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta. Rajawali.
- Tindangen, Megi. *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)*. *Jurnal Efisien*. Volume 20 No. 3 (2020)
- Tiryakian, Edward A. *Dialectics of Modernity: Reenchantment and Dedifferentiation as Counterprocesses* Haferkamp, Hans and Smelser, Neil J. 1992. *Social Change and Modernity*. California, University of California
- Tuwu, Darwin. *Peran Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik* *Jurnal Al Izzah* Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018)
- Zahrok. Siti. *Peran Perempuan Dalam Keluarga*. *Prosiding SEMATEKSOS 3''Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0* (2018).